

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Abdul Hamid lahir di Bima pada tahun 1887, ia mangkat pada 1957. Pendidikan dari tingkat SD, SMP Abdul Hamid menempuhnya di Bima untuk nama sekolah nya tidak diketahui secara jelas. Dijelaskan Abdul Hamid pernah menempuh pendidikan di OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*) Bandung¹. Abdul Hamid merupakan keturunan *Raja Bicara* generasi ke-15 dari *Bilmana*². Ayahnya bernama Abdul Majid *Ruma Parenta (Raja Sakuru)* dan ibunya bernama Siti Aisyah (Ico). Ia memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Muhammad Hilir (*Ruma Ola*) dan Muhammad Nasir (wafat ketika kecil). Abdul Hamid memiliki istri bernama Minda Ratu Intan, dari pernikahannya dikaruniai tiga orang putra dan empat orang putri yaitu, Abdul Majid, M. Anwar, M. Fajar, Siti Mariam, Hadiante, Siti Aisyah, dan yang terakhir Arni.³

Sejak kecil Abdul Hamid memang sudah menonjol akan kesukaanya pada ilmu pemerintahan, banyak ilmu dari keluarganya yang ia pelajari, bahkan ia menempuh

¹ Hasil wawancara dengan cucu Abdul Hamid, Dae Akang. Dikampung Pane, Kel. Pane Kec. Mpunda Kota Bima. Tertanggal, 23 Juli 2023 di pukul 10: 50.

² *Bilmana* atau *Mawa,a Bilmana* merupakan raja, ia diatur oleh ketentuan adat untuk bersikap dan bertindak sebagai *rumata* (tuan kita), menjadi patron dan pusat percontohan bagi rakyatnya. untuk Jabatnya waktu itu kurang di ketahui karena tidak dijelaskan pada catatak kerajaan Bima (*BO Sangaji Kai*). Intinya *Bilmana* tersebut adalah kelompok dari garis keturunan Bangsawa pada kesultanan Bima.

³ Hasil wawancara dengan Ponaan Abdul hamid, Dae Fiah Lalu Hasan. Pane kel. Pane kec. Mpunda kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Tertanggal 2023, pukul 10:30 Wita.



pendidikan di OSVIA Bandung⁴. Hal tersebut yang membekali Abdul Hamid sehingga bisa terpilih dan diangkat menjadi *Raja Bicara* pada tahun 1920. Abdul Hamid menjadi *Raja Bicara* untuk menggantikan kedudukan pamannya yang bernama M. Qurais. Dalam menjalankan roda pemerintahan bersama dengan sultan Muh. Salahuddin. Perlu diketahui bahwa, yang bisa memangku jabatan *Raja Bicara* harus dari garis keturunan *Bilmana*. Jikapun tidak ada dari garis keturunan yang menggantikan, maka di ambil dari keturunan bangsawa *Manggampo Donggo*⁵ yang memenuhi syarat.

Kiprah Abdul Hamid pada pemerintahan di kesultanan Bima bisa di lihat dari berbagai aspek, dalam aspek politik Abdul Hamid berpartisipasi dalam perkembangan organisasi politik. Pada tahun 1937 Abdul Hamid mendirikan organisasi Muhammadiyah Bima⁶. Pada aspek ekonomi Abdul Hamid mendirikan koperasi konsumsi yang diberi nama “Satya Usaha”. Koperasi tersebut dibangun akibat dari adanya depresi tahun 1920-1921⁷. Diaspek pendidikan agama, Abdul Hamid mengarang kitab agama yang berjudul *Mukaddimah Muktadim* di terbitkan pada percetakan *Volks Drukrij* Makassar⁸. Selain itu

⁴ Fahrul Rizki, *Historiografi Bima*.(Yogyakarta: Ruang Media, 2019), hlm. 113.

⁵ *Manggampo Donggo* di sini sama dengan *Tureli Nggampo*, mereka adalah suatu kelompok yang satu yaitu yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan untuk menyatukan atau mempesatukan semua kekuatan politik. Dan sebelumnya *Manggampo* dan *Bilmana* adalah sosok yang berpengaruh pada tubuh pemerintaha kesultanan bima.

⁶ M. Hilir Ismail, *Peran Kesultanan Bima Dalam perjalanan Sejarah Nusantara*, (Mataram: Lengge, 2004), hlm. 166-168.

⁷ Lalu Wacana, B.A., Abdul Wahab., Jaka Sumpeno. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*. (Mataram: Depertemen pendidikan dan kebudayaan, 1991/1992), hlm 70.

ilir Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:159).



Abdul Hamid mendirikan sekolah Darul Tarbiyah (SMA Yasim sekarang) pada tahun 1931⁹. Abdul Hamid juga membangun mesjid pada tahun 1935 di Raba yang diberi nama “*Baitul Hamid*”¹⁰. Disisi lain Abdul Hamid pernah diberi penghargaan oleh pemerintah Hindia Belanda yakni sebuah medali kehormatan *Order of Orange- Nassau*. Hal tersebut di beritakan pada surat kabar lokal Batavia *Het Nieuws Van Den Dag Voor Nederlandsch Indie* yang terbitkan dalam bahasa Belanda pada 19 Maret 1923¹¹. Inilah kiprah Abdul Hamid selama ia mengabdikan dirinya untuk pemerintahan kesultanan Bima.

Dalam struktur pemerintahan kesultanan Bima telah disusun sesuai peran dan tugasnya masing-masing. Jadi dalam hal ini *Tureli Nggampo (Ruma Bicara)* merupakan perdana menteri yang bertugas dalam penyelenggara urusan pemerintahan. Makna lainnya “*Bicara*” sendiri adalah ‘menyampaikan pendapat, pertimbangan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan/kesultanan. “*Ruma*” dalam artianya yaitu tuan tidaklah bisa dipersamakan dengan raja sebagai penguasa kerajaan atau sultan. Selain itu juga ada *Jeneli, Bumi, Qadi, Gelarang*¹². Pemerintahan Bima sebetulnya sudah membaginya ke beberapa kekuasaan seperti di bidang legislatif (*Dewan hadat*), dibidang

⁹ Lalu Wacana, B.A., Abdul Wahab., Jaka Sumpeno. *Sejarah Kebangkitan Nasional ...*, (1991/1992:63).

¹⁰ Tawalinuddin Haris., Susanto Zuhdi., Triana Wulandari. *Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima* (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), hlm. 108 .

¹¹ Koran Lokal *Batavia Het Nieuws Van Den Dag Voor Nederlandsch Indie* yang berbahasa belanda diterbitkan pada 19 Maret 1923.



lullah Tajib, BA. *Sejarah Bima Dana Mbojo*, (Jakarta: PT. Harapan Masa hlm.183.

eksekutif (*mejelis tureli/Raja Bicara*), dan yudikatif (*syara hukum/majelis syariat*), dan ada kekuasaan secara hak waris yaitu kekuasaan sultan (*Sangaji*)¹³.

Tiga kekuasaan inilah yang sebetulnya silih berganti memberikan peran dalam kurung waktu tertentu, dan relasi yang dibangun itu sering kali mengalami hambatan secara struktural. Sehingga beberapa waktu membuat hubungan antara Abdul Hamid dengan sultan mengalami disharmonisasi atau tidak harmonis, pada tahun 1932-1933. Lantas muncul kesan seolah-olah porsi kekuasaan lebih banyak di tangan Raja Bicara Abdul Hamid. Hingga sultan selalu di olok-olok oleh orang sekitar untuk bisa mengendalikan kekuasaan tanpa bantuan dari *Raja Bicara*¹⁴. Adanya persaingan antarelite untuk merebut hegemoni. Perbedaan pandangan terkait kebijakan pengelolaan tanah hadat dan keberpihakan sultan terhadap kolonial Belanda. Keadaan semakin memburuk, karena adanya laporan bahwa terjadi defisit dalam penghitungan keuangan pada tahun 1935¹⁵.

Pada tahun 1934-1935 Abdul Hamid mulai dikucilkan, lalu dituduh melakukan penggelapan kas keuangan pemerintahan kesultanan Bima. Bahkan Abdul Hamid diadili dan di periksa di atas kapal Putih. Hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Abdul Hamid terbukti bersalah lalu diasingkalah ke Kupang¹⁶. Berdasarkan penjelasan diatas oleh penulis. Terjadi polemik politik yang begitu besar pada pemerintahan

¹³ Muslimin, A.R. Effendy. *Dou, Ruma Labo Dana: Dinamika Politik Kesultanan Bima 1905-1957*. **Disertasi** UI. 2011. hlm.220.

¹⁴ Muslimin Hamzah. *Laksana Awan Kisah Perjuangan Muhammad Salahuddin*, (Pengkab Bima, 2008 ANRI), hlm. 131.

¹⁵ Muslimin, A.R. Effendy. “*Dou, Ruma Labo* ” ..., (2011:171).



¹⁶ *matra Post. Faude in Bima Twee Rijksgrooten Geschorst. Tekort in* 6 November 1935.

kesultanan Bima, sebab itu penulis tertarik ingin menulis “*Raja Bicara* Abdul Hamid Dalam Dinamika Politik dan Pemerintahan di Kesultanan Bima tahun 1920-1950”.

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disharmonisasi antara sultan Muh. Salahuddin dengan *Raja Bicara* Abdul Hamid?
2. Mengapa Abdul Hamid disingkirkan dari pemerintahan dan tampil kembali sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pemerintahan kesultanan Bima?

3.1. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi secara spasial maupun temporal dan batas konseptual. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa cakupan masalah dalam penelitian ini sangat kompleks agar penelitian ini terfokus pada titik persoalan sehingga dapat menjawab substansi permasalahan secara memadai. Ruang lingkup temporal pada penelitian ini dimulai dari 1920. Alasan mengambil tahun 1920 merupakan tahun Abdul Hamid diangkat menjadi *Raja Bicara* dan mulai terjun dalam dunia politik. Kemudian penulis mengambil batasan tahun 1950 karena sekitar tahun tersebut Abdul Hamid kembali diangkat menjadi *Raja Bicara* setelah pasca dikucilkan dan dibuang ke Kupang. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini bertempat di Bima.



4.1. Tujuan penelitian

Setelah mengetahui permasalahan utama peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penyebab dan dampak dari perbedaan pandangan antara Abdul Hamid dengan sultan Muh. Salahuddin.
2. Menjelaskan serta menggambarkan Abdul Hamid yang disingkirkan dari pemerintahan kesultanan Bima dan tampil kembali sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pemerintahan kesultanan Bima.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengenang serta mengapresiasi peran atau jasa Abdul Hamid untuk masyarakatnya ketika ia menjabat menjadi Raja Bicara. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang seorang tokoh yang mempunyai peran besar pada masyarakat Bima kala itu.

5.1. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Gambaran mengenai penyebab disharmonisasi antara Abdul Hamid dengan sultan Muh. Salahuddin.
2. Mengetahui terkait Abdul Hamid yang disingkirkan dari pemerintahan dan tampil kembali sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pemerintahan kesultanan Bima.

6.1. Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian konseptual

Batas konseptualnya; Dinamika politik merupakan proses interaksi dan perubahan yang terjadi dalam sistem politik yang melibatkan individu, kelompok, atau lembaga.

Dalam rumusannya dinamika politik diartikan sebagai gerak politik yang disebabkan 1-kekuatan politik.



2.6.1 Penelitian yang relevan

Pada tahap penulisan proposal, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian, yaitu “*Raja Bicara Abdul Hamid dalam Dinamika Politik di Pemerintahan Kesultanan Bima Tahun 1920–1950.*” Sumber-sumber tersebut meliputi buku, skripsi, disertasi, jurnal ilmiah, serta arsip-arsip terkait. Melalui pengumpulan berbagai referensi ini, peneliti dapat melakukan kajian komparatif terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna menempatkan topik yang diangkat dalam konteks historiografi yang lebih luas.

Salah satu literatur utama yang digunakan adalah buku *Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima* karya Tawalinuddin Haris, dkk. Buku ini mengulas keberadaan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya Kesultanan Bima, dengan penekanan pada aspek geografis, demografis, sosial, dan budaya. Selain itu, buku ini juga menjelaskan transformasi kerajaan Bima menjadi kesultanan Islam, serta dampak kolonialisme di wilayah tersebut, terutama pada abad ke-17 hingga ke-19.

Buku *Sejarah Bima Dana Mbojo* karya Abdullah Tajib turut memberikan kontribusi penting dalam penelitian ini. Buku ini menyajikan rangkaian narasi sejarah Bima mulai dari asal-usulnya hingga masa pemerintahan para sultan. Di dalamnya dibahas pula keterlibatan rakyat dan pemuda dalam perjuangan melawan kolonialisme, strategi perluasan kekuasaan kolonial Belanda, serta intervensi militer Jepang pada masa transisi kekuasaan di Bima. Karya ini menguraikan sejarah Bima secara komprehensif dan mendalam.

Referensi lain yang digunakan adalah karya I Ketut Ardhana berjudul *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915–1950*. Buku ini membahas kebijakan administrasi kolonial Hindia Belanda di wilayah Nusa Tenggara, meliputi aspek politik, sosial, dan budaya. Dijelaskan pula bagaimana pembangunan infrastruktur serta



eksploitasi sumber daya alam berkontribusi terhadap perubahan struktur ekonomi tradisional masyarakat agraris menjadi lebih terintegrasi dengan sistem perdagangan kolonial.

Selanjutnya, buku *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara* karya M. Hilir Ismail memberikan penjelasan mengenai kontribusi Kesultanan Bima dalam bidang pemerintahan, sosial, dan budaya. Diuraikan pula bagaimana perkembangan Islam di wilayah ini mengubah sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan. Para sultan Bima digambarkan memiliki peranan penting dalam perjalanan sejarah selama lebih dari empat abad.

Buku *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat* yang ditulis oleh Lalu Wacana, B.A., dan tim, menyoroti dinamika perubahan pembangunan ekonomi serta aspek sosial-politik di wilayah Nusa Tenggara Barat. Karya ini juga menyinggung isu kesejahteraan dan pembentukan identitas lokal dalam konteks pergerakan nasional.

Disertasi Muslimin A.R. Effendy berjudul *Dou, Ruma Labo Dana: Dinamika Politik di Kesultanan Bima 1905–1957* menjadi salah satu rujukan utama dalam penelitian ini. Disertasi tersebut mengkaji dinamika internal politik Kesultanan Bima, terutama terkait konflik antar elite dan fragmentasi kekuasaan dalam mempertahankan otonomi lokal di tengah tekanan kolonial dan dinamika politik nasional.

Karya Bagus Wirawan berjudul *Pusaran Revolusi Indonesia di Sunda Kecil 1945–1950* memberikan perspektif regional yang relevan. Buku ini membahas peran kaum terpelajar di wilayah Sunda Kecil (Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur) dalam perjuangan revolusi Indonesia. Para intelektual lokal tersebut memainkan peran signifikan dalam perkembangan politik lokal pada masa revolusi, termasuk di

1.



Siti Maryam dalam bukunya *Sejarah Pemerintahan Adat Kesultanan Bima (Rekonstruksi Historis dari Naskah-Naskah Kuno Peninggalan Kesultanan Bima)* menjelaskan struktur pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku di Kesultanan Bima, berdasarkan sumber-sumber primer berupa naskah kuno Bo' Sangaji Kai. Buku ini mengulas secara rinci pelaksanaan hukum Islam dan adat di dalam dan di luar lingkungan istana, termasuk hukum antar bangsa serta hukum laut kesyahbandaran.

Terakhir, buku *Kesultanan Bima: Masa Pra-Islam sampai Awal Kemerdekaan* karya Tawalinuddin Haris dan tim menjelaskan kondisi masyarakat Bima sebelum kedatangan Islam. Diuraikan tentang kepercayaan animisme, masa penyebaran agama Hindu-Buddha, hingga kedatangan para mubalig Islam dari Sulawesi dan Jawa. Respons positif dari pihak kerajaan dan masyarakat menyebabkan Islam berkembang pesat, yang selanjutnya mengubah struktur kerajaan menjadi kesultanan. Buku ini juga membahas masuknya pengaruh kolonial Belanda di Bima, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

7.1. Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat bagian yaitu pengumpulan sumber (Heuristik), verifikasi (Seleksi sumber), interpretasi/analisa, dan penulisan sejarah (Historiografi).

a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang terdiri dari sumber tulis dan lisan. Sumber tulisan berupa arsip, dokumen, literatur, foto atau gambar yang diperoleh di Arsip Samparaja Bima, Arsip keluarga, Perpustakaan Pribadi *Mbojoklopedia* Bima, dan Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya.

i mencari beberapa referensi berupa dokumen arsip, buku, tesis dan juga per lisan merupakan data wawancara yang diperoleh langsung dari orang-



orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Selain itu, sumber lisan juga dapat diperoleh dari kerabat atau orang yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Oleh sebab itu, penulis melakukan pengumpulan sumber lisan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap beberapa orang atau narasumber yang dianggap mempunyai informasi yang dapat melengkapi sumber tulisan.

b. Verifikasi sumber (Seleksi sumber)

Verifikasi sumber dilakukan baik dalam aspek eksternal (bahan) maupun internalnya (isi dan informasi). Tidak semua bahan digunakan dalam merekonstruksi kejadian. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi pada setiap bahan. Upaya pertama dalam menyeleksi bahan adalah dengan kritik eksternal yang terkait dengan bahan sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk mengetahui posisi sumber sejarah, bahan dan waktu pembuatannya. Tahap kedua penulis melakukan seleksi secara internal. Kritik internal membutuhkan kecermatan dan daya kritis dalam memahami pesan atau informasi yang terkandung dalam sumber.

c. Interpretasi/analisa

Setelah diseleksi maka diadakan sintesis atas informasi dari sumber penelitian berdasarkan subyek kajian. Upaya ini lebih memudahkan dalam melakukan interpretasi (penafsiran) atas realitas sosial. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah fakta, yang dimaksud dengan fakta adalah suatu pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empirik tentang suatu gejala yang ditanggapi dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran tertentu.

d. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Tahap akhir dari penulisan sejarah, dimana pada tahap ini penulis menuangkan fakta yang telah ditafsirkan secara tertulis, dirangkaikan dalam narasi sejarah dan deskriptif. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan catatan lengkap pada kutipan

san pada bahan rujukan. Pada kutipan selanjutnya, penulis menggunakan nodel *body note* (catatan langsung yang menggabungkan unsur-unsur dari



gaya Harvard style dan APA, ini sering di sebut sebagai gaya catatan refrensi dalam tulisan (in-text citation). Penulis di harapkan dapat menyajikan suatu tulisan dengan objektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

8.1. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Membahas Gambaran Umum Kesultanan Bima pada tahun 1920-1950.

BAB III Membahas Peran Abdul Hamid Dalam Pemerintahan .

BAB IV Membahas Dinamika Politik Pemerintahan Kesultanan Bima tahun 1920-1950.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.



BAB II

GAMBARAN UMUM KESULTANAN BIMA PADA TAHUN 1920-1950.

2.1. Geografis dan Potensi Ekonomi

Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah diperkirakan 4.870 km² atau 1/3 dari luas Pulau Sumbawa. Dalam peta Indonesia modern, Bima terletak pada titik koordinat 8° 27' 14" 06'' S dan 118° 43' 38" 20'' E. Dibatasi oleh daerah Dompu disebelah barat, sebelah timur dengan Selat Sape, sebelah utara dengan laut Flores, dan sebelah selatan Samudera Indonesia¹⁷. Tiga daerah perbatasan berhadapan langsung dengan laut, daerah penghubung dengan daratan yakni, daerah Dompu.

J.J. Hollander menggambarkan bahwa batas antara Bima dengan Dompu adalah suatu garis khayal dengan garis lintang 118° 37' di pantai utara melalui gunung Wawo Sahe sampai 188° 38' 30' ke arah pantai selatan. Menurut pemerintah Bima sebaliknya menetapkan, dari Doro Dewa diatas 118°31' sebelah pantai utara ke sebelah barat teluk Bima. Bagian barat gunung Wadu Lako menuju arah selatan melalui puncak gunung Doro Madompo ke kampung Bima bernama Pajo, berbelok ke selatan menuju Batu Nteli Mejagam, dengan arah yang sama menuju wadu Lepi ke arah barat menuju Wadu Udu berdekatan dengan kampung Dompu yang bernama Daha. Dari arah selatan-timur menuju batu Wadu Sugu dan akhirnya ke arah selatan di atas 118°14'¹⁸.



ir Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:13).

hullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:10).

Batasan Bima di sebelah timur yang terletak di pulau Flores dalam ketentuan pemerintah hindia Belanda tahun 1864, ke satu garis lurus khayal ke arah selatan-barat menuju muara sungai Nanga Ramo di pantai selatan. Dari penetapan tersebut Bima melepaskan semua haknya di Galeteng Ende dan pulau Sumba. Pada tahun 1874 Bima tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan kayu cendana kepada pemerintah Belanda¹⁹.



Gambar 2.1 Peta Sumbawa Bagian Timur Tahun 1916. Sumber. KITLV Leiden Picture, No. KK. 102-04-02.



per, "Het Eiland Soembawa ...," (1908:71).

Menurut Zollinger pada tahun 1847 saat mengunjungi Pulau Sumbawa. Luas daerah Bima di Pulau Sumbawa mencakup 57 mil persegi dan bersama pulau-pulau lainnya, tanpa Flores mencakup 71,5 mil persegi. Wilayah Bima di Flores mencakup luas 84,5 mil persegi, seluruh daerah Bima mencakup luas 156 mil persegi.²⁰ Flores menuntut kemerdekaan pada tahun 1929. Sehingga wilayah saat itu hanya berada di Pulau Sumbawa bagian timur yang sekarang mencakup wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.²¹

Awal abad ke- 20 Bima dibagi menjadi tiga *distrik*, yaitu Belo, Bolo, dan Sape, yang masing-masing diperintah oleh seorang *galarang*, kepala yang membawahi *galarang* rendahan dan kepala-kepala kampung. *Distrik Belo* terletak di sebelah timur teluk Bima yang terdiri dari 18 kampung, yaitu kampung Belo, Tonggondoa, Tonggorisa, Talabiu, Rabakodo, Cenggu, Roi, Bre, Ngali, Tente, Samili, Sakuru, Nata, Tangga, Tenga, Dadibou, Baralau, dan Simpasai. *Distrik Bolo* terletak di sebelah barat teluk Bima, yang terdiri dari 18 kampung, yaitu kampung Bajo, Monggo, Ncandi, Dena, Tonda, Bolo, Sumbi, Tangga, Sila, Nggembe, Leu, Sondo, Sonco, Kara, Daru, Pali, Donggo dan Bolo. *Distrik Sape* terletak di bagian yang paling timur, terdiri dari 12 kampung, yaitu Sape-Weki, Sumi, Bedi, Jia, Kale'o Na'e (besar), Simpasai, Parangina, Roke, Sari, Do, Kale'o To'i (kecil)²².

²⁰ H. Zollinger, "Verslag van eene...", (1852:69).

²¹ Muslimin, A.R. Effendy. "*Dou, Ruma Labo*" ..., (2011:55).

²² Siti Maryam. *Bandar Bima*. (Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian 1 Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1992/1993). hlm. 63-64.



Selain tiga distrik tersebut, ada wilayah khusus yang terdiri dari 42 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala kampung dengan pangkat (gelar) Gelarang atau seorang lebe yang langsung berada di bawah kewenangan sultan, yaitu: Wawo, Pasa, Ntori, Lamba, Buncu ma Do, Buncu ma Da, Sapaga, Lela, Raba Dodu, Raba Kodo, Rabadompu, Pena Na'e, Pena To'i, Pena Kalate, Raba Tola, Tolo Tando, Mande, Ntobo, Rontu, Poki, Tato, Santi, Sadia, Bedi, Des'a, Karara, Monggonao, Mangge Maci, Gindi, Kedo, Panda, Dara, Bajo, Nanga lere, Sondo, Sarita, Punti, Sai, Sowa, Kalo, Wera, Raba londe, dan tiga kampung besar yaitu: Parado, Karumbu, dan Donggo Ele, yang masing-masing mempunyai lebih dari 300 rumah²³.

Adapun perjanjian terakhir kesultanan Bima dengan Gubernur Hindia Belanda pada tahun 1938, bahwa batas wilayah Bima (*Landschap* Bima) dibatasi bagian utara oleh Laut Jawa, bagian barat oleh *Landschap* Dompus, bagian selatan oleh Laut Hindia dan bagian timur diambil batas antara *Landschap* Bima dan *Landschap* Manggarai bagian barat selat Sape pada garis *vadem* 100²⁴. Sebaliknya pada tahun 1935, Dompus masuk sebagai wilayah kekuasaan Bima²⁵ dan menjadi Kecamatan Sanggar dan Kore sampai sekarang. Luas wilayah Bima, termasuk dari wilayah kerajaan Tambora, yaitu 5.817, 360 km². Penggabungan itu kemudian ditetapkan oleh pemerintah Belanda dengan surat keputusan No. 311 tanggal 3 oktober 1928²⁶.

Ditahun 1944 daerah Bima dibagi menjadi dua daerah Swapraja yaitu, Swapraja Bima dan Swapraja Dompus, menjadi Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompus.

²³ Siti Maryam. *Bandar Bima* ..., (1992/1993:64).

²⁴ Siti Maryam. *Bandar Bima* ..., (1992/1993:70).

²⁵ Hilir Ismail. *Peran Kesultanan Bima* ..., (2004: 21).

imin, A.R. Effendy. "*Dou, Ruma Labo*" ..., (2011:56).



Berdasarkan Undang-Undang NIT No. 44 /1950 Kesultanan Bima baru berubah statusnya menjadi daerah Swapraja Bima pada tanggal 2 Oktober 1950²⁷.

Dari segi topografi hampir 70% daerah Bima terdiri dari daratan tinggi dan wilayah pegunungan. Daratan tinggi dan pegunungan ditubuhin banyak pohon-pohon lebat. Sedangkan 30% sisanya terdiri dari daerah daratan rendah yang berpotensi untuk pertanian dan pemukiman penduduk²⁸. Daerah Bima beriklim tropis, kering (panas), dan memiliki curah hujan yang rendah. Rata-rata curah hujan dalam 4 bulan yakni, Desember, Januari, Februari dan Maret. Musim kemarau pada bulan Juli hingga September. Curah hujan rata-rata 58.75 mm/tahun. Hujan maksimum terjadi pada bulan Januari dan minimum berlangsung pada Juli sampai Agustus. Curah hujan tertinggi pada bulan Februari (171 mm) tercatat di wilayah Donggo (500 m dpl) terutama di Mbawa, Kala, Padende dan Kananta yang pada tahun 1930-1932 berkisar antara 1.467 dan 1.238 mm, terendah pada bulan Agustus (10 mm) terjadi di Sape dan Sanggar (ketinggian 5 m dpl) dengan suhu rata-rata berkisar antara 26 hingga 34°C²⁹.

Iklim Bima yang demikian, baik untuk peternakan dan pertanian. Pada bidang pertanian menghasilkan padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Di bidang peternakan secara tegas pemerintah kesultanan Bima sudah mengeluarkan peraturan No. 19/VIII-a

²⁷ Hilir Ismail. *Peran Kesultanan Bima*., (2004:21),. Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:388).

²⁸ Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:11).



imin, A.R. Effendy. “*Dou, Ruma Labo*” ..., (2011:36).

tentang peternakan kerbau, kambing, dan kuda³⁰. Kuda Bima terkenal sebagai jenis kuda yang kuat dan tahan memikul beban, bahkan banyak para pedagang di luar daerah yang datang membeli. Khususnya Sulawesi, kuda dan kerbau diekspor dengan pengangkutan benawa (perahu-perahu transpor hewan).

Peternakan pada daerah Sumbawa (Bima), pada tahun 1914-1917 rata-rata mengekspor sekitar 2.000 kuda per tahun. Selain kuda, kerbau juga sangat dominan dikawasan tersebut. Hal tersebut menambah peluang ekonomi yang baik³¹, karena Bima memiliki wilayah daratan rendah yang bisa dimanfaatkan oleh para peternak untuk mengelolah hewan peliharaannya.

Pada abad ke-17 Bima menjadi sebuah kerajaan terpenting dalam lintas perdagangan dan pelayaran hingga menjadi kota bandar dalam lintas pelayaran-perdagangan dari Malaka ke Maluku atau sebaliknya menjadi penting artinya baik sebagai tempat singgah (istirahat) maupun sebagai tempat aktivitas perdagangan. Karena Bima dan daerah sekitarnya menghasilkan produk atau komoditi tertentu seperti kain kasar, budak, kuda, kayu dye (kayu celup) dan hasil bumi lainnya seperti kacang-kacangan dan beras (padi)³².

³⁰ M. Al-Qautsar Pratama, “Kehidupan Masyarakat Bima pada Kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin tahun 1915-1951” , *Zawiyah: Jurnal pemikiran islam* Vol.5, No. 2, Desember 2019, hlm. 343,347.

³¹ Ketut Ardhana. *Penataan Nusa Tenggara ...*, (2005:215).



linuddin Haris., Susanto Zuhdi., Triana Wulandari. *Kerajaan Tradisional di* l.

Baru pada abad ke-19 masyarakat Bima memiliki minat yang besar pada penanaman bawang, lainnya lebih kepada pertanian jagung. Croo (1919) menyatakan bahwa orang Bima adalah petani yang baik dan ulet yang menghabiskan waktunya hanya bertani bawang. Kegagalan panen yang terjadi di beberapa daerah di Bima seperti di Wera pada tahun 1915, menyebabkan kerugian sebesar 68.272 gulden sementara di Dompu sebesar 63.142 gulden pada tahun 1916. Kegagalan tersebut diakibatkan kurangnya pengawasa dari pihak pegawai di daerah tersebut. Tidak sedikit setiap tahunnya, Bima mengekspor 3.000 ton bawang. Sejak dulu Bima sudah dikenal sebagai pengeksport bawang terbanyak. Perluasan perdagangan secara keseluruhan mengalami kenaikan ekspor dari 505.707 gulden pada tahun 1910 menjadi 667.891 gulden pada tahun 1911³³.

Padi cukup dominan yang ditandai dengan luas daerah persawahan yang cukup besar. Hasil panen sawah cukup tinggi dan beberapa tahun pendapatan pajak meningkat dari 36.000 gulden menjadi 76.000 gulden. Di Bima tanah yang diairi seluas 20.000 hektar³⁴. Dorf juga melaporkan bahwa pertanian penduduk pribumi juga mengerjakan ladang kering. Di daerah Raba sebagian besar sawahnya diairi. Pemilik tanah membayar sejumlah uang pada pemerintah sebagai biaya perawatan dengan air.

Bima dikelilingi oleh laut dan diapit oleh dua gunung berapi yaitu Tambora (dengan ketinggian 2.851 mdpl) dan Sangiang (2.100 mdpl)³⁵. Bahkan banyak teluk-teluk seperti, teluk Sanggar, Teluk Bima, Teluk Waworda. Posisi pesisir yang demikian, sangat menguntungkan untuk para nelayan³⁶ menangkap ikan, teripang, penyu dll. Bahkan di

³³ Ketut Ardhana. *Penataan Nusa Tenggara ...*, (2005: 206).

³⁴ Ketut Ardhana. *Penataan Nusa Tenggara ...*, (2005: 209).

³⁵ slimin, A.R. Effendy. "Dou, Ruma Labo" ..., (2011:36).

³⁶ r Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:14).



sepanjang pantai di manfaatkan untuk tambak-tambak ikan bandeng. Tiap tahun hasil laut diperdagangkan ke Makassar, Jawa, dan Singapura, oleh orang-orang Bajo³⁷.

Aktivitas berubah akibat letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815, merupakan peristiwa besar dalam sejarah manusia. Sebuah peristiwa yang menghancurkan batas-batas alam secara signifikan. Selain itu terjadi banyak perubahan struktur demografi, tata ruang wilayah serta lahan penduduk pada kawasan tersebut. Tanah tertutup lapisan abu vulkanik, banyak pemukiman yang rusak, hewan ternak, dan lahan pertanian mati. Terjadi kelaparan, semua orang begitu sengsara, ada ibu yang menjual anaknya untuk ditukar dengan beras. Beberapa daerah sekitar gunung seperti, Pulau Sumbawa, Dompu dan Bima tergerus oleh vulkanik panas dan terjangan hujan abu. Kerajaan Pekat dan Tambora lenyap ditutupi oleh vulkanik³⁸.

Disisi lain terjadi perubahan lingkungan pada tahun 1920an. Perubahan itu dipercepat oleh adanya penebangan hutan secara tidak terkendali, melalui aktivitas perladangan yang berpindah-pindah dilakukan oleh orang, Donggo, Wawo, Sape, Wera dan Parado. Khususnya orang Donggo, merupakan perusak hutan yang ahli dan rajin. Pada tahun 1926 jumlah itu naik menjadi 304 orang. Bersamaan dengan itu program pemulihan hutan melalui reboisasi mulai digalakkan. Hasilnya, luas area hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi meningkat tajam. Pada tahun 1932 di lereng Tambora sekitar 30.000 hektar lahan dimanfaatkan oleh Perusahaan Kenanga³⁹.

³⁷ Siti Maryam. *Bandar Bima ...*, (1992/1993:80).

³⁸Henri Chambert-Loir. *Kerajaan Bima Dalam Sastra dan Sejarah*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gretnia Ecole Francaise d' Extreme-Orient (EFEO), 2004), hlm.



slimin, A.R. Effendy. *"Dou, Ruma Labo "* ..., (2011: 40-41).

Perusahaan yang dikelola oleh dua orang Swedia, menyewa dengan membayar sekitar 300 gulden setiap tahun. Kedua orang Swedia tersebut mengurus “*Koperative Forbunder*” (Perkumpulan Koperasi) dari Stockholm. Sejak tahun 1932 sekitar 100 hektar tanah perkebunan dibuka. Perkebunan tersebut mengolah kopi arabica dan tanaman lainnya.

2.2. Demografi dan Kondisi Sosial

Sebelum terbentuknya kerajaan, Bima sudah didiami oleh kelompok-kelompok masyarakat yang hidup secara terstruktur dalam kekuasaan para *ncuhi*. Dipertegasakan dalam Bo’ (Catatan kerajaan Bima) dengan kalimat: “ *Sawatip pu ba londona sia Sangaji, na wa’u ra wara dou labo dana*”,

Dalam artianya “*bahwa sebelum ada keturunan seorang raja, sudah ada orang dengan tanahnya*”. Kelompok *ncuhi* disesuaikan dengan daerah yang didiaminya seperti, *Ncuhi Doro Wuni, Ncuhi Banggapupa, Ncuhi Dara, Ncuhi Padolo, Ncuhi Kala, Ncuhi Parewa, Ncuhi Kabuju, Ncuhi Kolo, Ncuhi Palama, Ncuhi Padende* dan sebagainya⁴⁰.

Daerah Bima memiliki dua nama yang disebut dengan “*Mbojo*” dan “*Bima*”, “*Dana Mbojo*” disebut dengan Tanah Bima, sedangkan orang Bima disebut dengan “*Dou Mbojo*”. Nama Bima berasal dari “*Sang Bima*” yang konon dinyatakan sebagai raja pada Kerajaan Bima. Pengangkatan sang Bima atas dasar kesepakatan dari para *ncuhi* yang menjadikan raja Bima dengan gelar *Sangaji*⁴¹. Sedangkan “*Mbojo*” berasal dari “*babuju*”

⁴⁰ Hilir Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:25-26).

⁴¹ Henri Chambert-Loir., Siti Maryam. Bo’ Sangaji Kai, *Catatan Kerajaan Bima*. le Francaise d,Extremen-Orient dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia,



yang artinya tanah di ketinggian (berbukit). Babuju ini konon adalah tempat pelantikan para raja di luar istana yang berada di Dara⁴² dan tempat tinggalnya *Ncuhi Dara*. Bauman mengatakan bahwa para *ncuhi* merupakan tuan-tuan tanah yang berkuasa di daerah masing-masing, kemudian di persatukan oleh maharaja sang Bima menjadi satu kerajaan yang bercorak kehinduan⁴³.

Dalam *Hikayat Sang Bima* diceritakan bahwa sang Bima meninggalkan Pulau Jawa dan berlayat ke “matahari hidup (timur) untuk menjalani negeri yang lain dalam menyerang lawan supaya termasyhur nama mereka”⁴⁴. Dalam perjalanannya dengan perahu mereka sampai di sebuah pulau yang bernama Pulau Satonda dalam bahasa Bima berarti “pulau pertama yang diinjak”. Lalu bertemu dengan seekor naga bersisik emas. Dari pertemuan itu Sang naga melahirkan seorang putri yang bernama putri Tasi Sari Naga. Putri Tasi Sari Naga dikawini oleh Sang Bima dan melahirkan dua orang putra yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala. Kedua putranya tersebut yang menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Bima-Dompu dan menjadi penerusnya.

Menurut legenda Bima yang berasal dari Jawa, keturunan keluarga Pandawa dalam epik India Mahabharata. Ayahnya bernama Maharaja Pandu Dewata, anak Maharaja Tunggal Pandita. Ibu Bima adalah putri Kunti, saudara Tunggal Pandita yaitu Maharaja Indra Ratu yang menurunkan raja-raja Luwu Sulawesi Selatan⁴⁵. Bima merupakan bagian

⁴² Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:42).

⁴³ Tawalinuddin Haris., dkk., *Kesultanan Bima Masa Pra Islam sampai Masa Awal Kemerdekaan*. (Yoyakarta: Ruas Media, 2019), hlm. 15.

⁴⁴ Henri Chambert-Loir. *Kerajaan Bima Dalam...*, (2004:149).



mbang Sulistiyo, *Multikulturalisme di Bima pada Abad X-XVII*, Jurnal .24 No. 2 (Juli, 2014), 157.

dari lima pandawa yaitu, Darmawangsa, Sang Bima, Sang Kula, Sang Arjun dan Sang Dewa⁴⁶. Sang Bima dikenal melalui orang-orang Jawa yang diceritakan dalam sebuah tokoh pewayangan Jawa⁴⁷. Mungkin sekali bahwa penggunaan nama Bima dapat dihubungkan dengan pengkultusan tokoh yang berkembang di Jawa Timur pada zaman Majapahit (1293-1521).

Helius Sjamsuddin, dalam tulisannya menyatakan bahwa sang Bima itu bukanlah tokoh dalam Mahabarata, ia merupakan seorang pelaku sejarah yang sebenarnya berasal dari Jawa (seorang aristokrat atau anggota elit tradisional) yang datang ke pulau Sumbawa. Ketika tokoh sang Bima itu datang bersama dengan rombongannya di Pulau Sumbawa (khusus Bima) telah ada unit-unit politik kecil dari kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas sederhana yang dipimpin oleh ncuhi atau dalu. Sang Bima kawin dengan putri setempat dan mempunyai keturunan. Secara simbolis perkawinan ditafsirkan sebagai penemuan antara dua pendukung kebudayaan yang berbeda tanpa adanya benturan atau konflik. Pihak penguasa setempat yang diwakili oleh Ncuhi Dara yang memerintah Mbojo mengangkat sang Bima sebagai Raja. Dengan demikian sistem kerajaan dan rajanya disebut *Sangaji*. Nama Mbojo di ganti dengan nama Bima baik sebagai nama tempat, nama daerah ataupun nama seluruh etnis⁴⁸.

Menurut Zellinger ciri-ciri orang Bima ditandai dengan warna kulit agak gelap (hitam), muka agak menonjol, postur tubuh agak kecil, leher agak besar. Dada lebar dan

⁴⁶ Henri Chambert-Loir. *Kerajaan Bima Dalam ...*, (2004:46).

⁴⁷ Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:52).

⁴⁸ Helius Sjamsuddin, *Tokoh Sang Bima, Mitos atau Realita. (Sejarah Mentalitas Tradisional Bima Dompu)*., Makalah untuk kongres Nasional Sejarah Tahun , November 1996., hlm. 229.



ukuran badan bagian atas sedikit lebih panjang dibandingkan dengan bagian bawahnya⁴⁹. Pria dan wanita memakai busana Bima, wanita memakai sarung. Rumah-rumah Bima berukuran kecil dan semua berdiri di atas tiang. Tiangnya hanya beberapa kaki dari permukaan tanah. Bahasa Bima serumpun dengan bahasa Sawu dan Manggarai dan digunakan di Bima, Dompu, Sanggar. Penulisanya menggunakan huruf melayu. Zollinger lebih menegaskan bahwa bahasa Bima ditulis dengan aksara Arab-Melayu. Aksara Bima atau "*Nggahi mantoi*", kemudian menghilang dan banyak dipakai oleh Masyarakat Donggo ele yang mendiami wilayah desa Sambori, mereka masih memakai dialek bahasa Bima asli. Aksara Bima banyak persamaan dengan aksara Makassar Kuno⁵⁰.

Secara historis orang Bima di bagi atas dua kelompok yakni, Kelompok penduduk asli, disebut *dou Donggo* yang menghuni kawasan daerah pegunungan dan lembah⁵¹. Berdasarkan daerah pemukiman, *dou Donggo* di bagi kedalam dua bagian kecil yaitu, "*dou Donggo ele*" (orang Donggo timur) masyarakat ini mendiami daerah daratan yang tinggi di pegunungan (tengah), sekarang termaksud wilayah kecamatan Wawo Tengah, daerah pemukiman ini di sekitar kaki Gunung Lambitu. Orang Donggo ele terdiri dari, orang Kuta, Teta, Sambori, Tarlawi, Kalodu⁵², Kadi dan Kaboro. Pengaruh kepercayaan

⁴⁹ H.Zollinger, "*Verslag van een ...*", (1850:80).

⁵⁰ Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:36).

⁵¹ Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:32).

⁵² Kalodu merupakan suatu desa yang berada di pegunungan Karumbu, kec. Langgudu, konon tempat ini menjadi bukti kejayaan islam di tanah Bima. Sebab di sana esjid yang berdiri kokoh yang pertama kali adanya pengaruh islam di Bima. van serta masyarakat mengatakan bahwa Mesjid Kamina di bangun oleh atau Abdul Kahir pada abad ke ke 17 atau sekitar tahun 1621 M.



lokal masih sangat kental. Keadaan *Dou Donggo ele* relatif mundur dibandingkan *Dou mbojo*⁵³.

Sedangkan “*dou Donggo ipa*” (orang-orang Donggo seberang) mendiami wilayah daratan tinggi pegunungan sebelah barat teluk Bima, yaitu kecamatan Donggo. *Dou Donggo ipa* masih ada yang belum beragama islam secara keseluruhan. Di dimanfaatkan oleh para Zending dan misi kristen pada awal abad ke-20. Orang *Donggo Ipa* sudah di pengaruhi agama hindu budha dengan bukti sejarah yang ada di Wadu Pa,a. Akibatnya sampai sekarang, orang *Donggo ipa* masih menganut dua agama yaitu islam dan kristen serta diwarnai dengan kepercayaan lokal⁵⁴.

Kepercayaan orang Bima tidak jauh berbeda dengan kepercayaan orang Indonesia pada umumnya. Kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang, benda-benda dan roh-roh sakti yang ada di gunung-gunung, pohon-pohon, serta batu-batu. Roh tersebut mereka percaya bahwa akan memberikan pertolongan. Dalam masyarakat Bima roh-roh nenek moyang di zaman awal sebelum islam disebut Marafu dan tempat kediamannya disebut Parafu.

Selain orang-orang Bima asli, ada orang-orang pendatang seperti orang-orang Bugis-Makassar, Melayu, Jawa, Sasak dan Manggarai. Mereka umumnya bermukim di daerah pantai, antara lain di pelabuhan Bima dan Sape. Orang-orang Eropa atau indo-Eropa yang berdiam di Bima, umumnya adalah serdadu sedangkan orang-orang Cina, Arab dianggap sebagai pendatang. Di ibukota Bima yang terdiri atas 25 kampung yang berjumlah 700

⁵³ Hilir Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:15).



Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:16).

rumah, menempati kluster-kluster tertentu yang cenderung bersifat homogen seperti kampung Bugis dan kampung Melayu bahkan menurut Zollinger ada kampung Walanda yang sekarang di sebut kampung Benteng⁵⁵.

Kurung waktu abad ke-20 masyarakat Bima di gambarkan dalam tiga kelas, yaitu bangsawan, menengah dan budak denda (*Pandeling*). Secara keseluruhan, masyarakat Bima dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bangsawan (*Ruma*) dan orang bebas (*dou mardika*). Kelompok bangsawan terdiri atas pangeran, sultan. kelompok menengah terdiri atas pemimpin yang lebih rendah, pemimpin agama dan masyarakat pribumi yang merdeka, kelompok yang terendah adalah para budak.⁵⁶

Di perkampungan orang-orang Bima, terdapat istana sultan Bima yang berdekatan dengan masjid. Masjid dibangun dari bata beratap tumpang; rumah-rumah para kepala kondisinya tidak jauh berbeda dengan penduduk biasa, hanya ukurannya lebih besar. Demikian juga dengan rumah tinggal para bangsawan, para pangeran dan pejabat kerajaan dibuat dari kayu, beratap sirab. Tempat tinggal sultan (istana) dibuat dari kayu berukuran besar, berdinding papan dan atapnya bertingkat, terlihat lebih baik dan konstruksinya lebih kuat dibandingkan dengan rumah-rumah orang Bima pada umumnya⁵⁷.

Istana yang sekarang dalam bahasa Bima disebut *Asi Wadu*, yakni Istana Batu direnovasi 1920-an. Istana menghadap utara, pagar istana membuka ke alun-alun barat,

⁵⁵ Tawalinuddin Haris., Susanto Zuhdi., Triana Wulandari. *Kerajaan Tradisional di ...*, (1997:17). H.Zollinger, "*Verslag van een ...*", (1850:98).

⁵⁶ Ketut Ardhana. *Penataan Nusa Tenggara ...*, (2005:73).



linuddin Haris., Susanto Zuhdi., Triana Wulandari. *Kerajaan Tradisional di* l.

melalui sebuah pintu gerbang berbentuk balai bertingkat yang persegi delapan, yang disebut *uma lare-lare*. Balai ini berfungsi sebagai pintu masuk para pejabat dan pengawal istana di atasnya pula sultan berdiri dihadapan rakyat pada perayaan maulud yang berlangsung empat hari. Di sebelah timur laut istana ada kediamana Perdana Menteri (*Raja Bicara*) yang berdiri kokoh rumah kayu besar terletak di Nteli (Kampung Na,e)⁵⁸.

Jumlah penduduk Bima pada sensus penduduk bulan November 1920 memperlihatkan bahwa penduduk Bima berjumlah 152.000 jiwa, kemudian pada tahun 1929 menjadi 148.882 jiwa yang berarti terjadi penurunan sebanyak 3.118 orang (4,7 %) atau berkurang rata-rata dalam setahun 346 orang⁵⁹. Diakibatkan daerah Bima terjangkit penyakit, hingga beberapa orang melakukan perpindahan untuk sementara waktu. Baru pada tahun 1930 mengalami peningkatan menjadi 200.289 jiwa. Dan tahun 1950 sebanyak 193.596 jiwa tetapi terjadi penurunan sebanyak 6.693 jiwa dari angka sebelumnya.

Penurunan Jumlah penduduk, diakibatkan karena tahun 1942 terjadi peralihan kekuasaan ke tangan Jepang, dengan dalil daerah Bima termasuk dalam daerah yang strategis untuk Jepang jadikan pangkalan konsentrasi pasukan untuk menyerang ke Australia. Tentara Jepang berada di setiap sudut Bima, sebagian besar berada di Rompo-Karumbu bagian selatan pulau Sumbawa dan pantai lautan Hindia. Sejak tahun 1934 Kesultanan Bima menjadi serangan empuk dari sarangan bom sekutu Jepang. Ratusan jiwa melayang bahkan infastruktur serta benda hancur. Kampung Sumbawa, kampung Bara, kampung Sigi, kampung Sarae, kampung Tanjung berkali-kali di bom, hingga

⁵⁸ Henri Chambert-Loir. *Indonesia Tiga Belas Karangan*. (Jakarta-Paris:KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Ecole francaise d'Extreme-orient, Institut Francis d' indonesia, 2018),. *Negara, Kota, Niaga Kasus Bima*. Diterjemahkan oleh Aris Bagus Prasetyo. hlm. 188-90.



imin, A.R. Effendy. "*Dou, Ruma Labo*" ..., (2011:45).

nyaris rata dengan tanah. Kampung Rabangodu, kampung Rade juga hancur terbakar. Jepang menjadikan kota Raba dan Bima menjadi kota hantu siang dan malam. Semua penduduk memilih untuk berpindah ke tempat yang aman untuk sementara waktu⁶⁰.

Kekurangan bahan pokok makanan menimpah seluruh masyarakat Bima kala itu. Nasi digantikan dengan kedelai, umbian, dan kaladi gatal. Masyarakat terdampar penyakit malaria, diare, dll. Bahkan obat-obatan sama sekali tidak ada. Pakaian saja terbuat dari karung-goni⁶¹. Ditambah pada tahun 1943 gadis-gadis Bima ingin di jadikan pelayan cafe dan pemuas nafsu oleh Jepang. Permintaan tersebut ditolak karena mereka dengan sengaja menyinggung perasaan dan kehormatan pemerintah kesultanan Bima dan rakyat. Masyarakat Bima kala itu merasa resah dan panik terhadap situasi yang begitu mencekang. Solusi yang di ambil oleh oleh sultan yaitu menyarankan dan manganjurkan kepada orang tua gadis-gadis tersebut, agar segera menikahkan anak gadis mereka dengan kerabat atau keluarga dekat, yang dianggap jejaka dan pantas. Perkawinan tersebut lebih di kenal dengan “kawin barontak”⁶².

⁶⁰ Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:322).

⁶¹ Ketut Ardhana. *Penataan Nusa Tenggara ...*, (2005:323-326).

⁶² *Nika Baronta* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh gadis-gadis dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dari kerabatnya. Pernikahan ini dilakukan karena agar pemerintah Jepang tidak menjadikan gadis-gadis Bima untuk menjadi pelayan mereka pada bar-bar maupun cafe pada masa itu. Upacara perkawinan berlangsung cukup sederhana dengan hidangan makana sederhana atau seadanya yang penting melakukan ada saat itu.



2.3. Kondisi Politik Pemerintahan Kesultanan Bima.

Setuasi politik Kesultanan Bima berubah oleh kontrak yang ditandatangani VOC dengan Makassar, dan Bima pada 1667 dan 1669. Kemudian kemakmuran Bima mulai menurun, diperparah oleh letusan Gunung Tambora pada 1815. Terserapnya Bima ke dalam kawasan Hindia-Belanda pada tahun 1905 menandai fase baru dalam sejarah⁶³. Pada tahun 1905 Belanda memaksa sultan untuk menyerahkan daerah Manggarai dan setahun kemudian (1906) Belanda memaksa sultan menandatangani kontrak politik panjang (*Lange kontrak*)⁶⁴. Setelah itu, perjanjian kontrak pada tahun 1908 perjanjian tersebut sangat merugikan kesultanan Bima.

Reaksi masyarakat terhadap perjanjian yang diterapkan pemerintah Belanda sangat merugikan masyarakat. Situasi demikian memacuh perlawanan rakyat Ngali, Kala dan Dena yang semata-mata untuk mempertahankan agama, adat-istiadat, kedaulatan dan kemerdekaan. Pada tahun 1908 Belanda berhasil memadamkan semangat perjuangan masyarakat Bima. Kedudukan sultan kian sulit karena isi kontrak panjang yang ditandatangani, pada tahun 1908 harus ditaati serta dilakukan. Dengan demikian mulai tahun 1910 lembaga sara hukum tidak lagi berperan sebagai mana fungsinya⁶⁵.

Sara hukum yang tidak berperan sesuai isi kontrak panjang (*Lange kontrak*) pada tahun 1908 dimanfaatkan oleh sultan bersama dengan raja bicara untuk dijadikan wadah mengurus agama. Pendidikan yang bersifat tradisional yang dipegang oleh *lebe* dan *cepe*

⁶³ Henri Chambert-Loir. *Indonesia Tiga Belas ...*, (2018:196).

⁶⁴ Tawalinuddin Haris., Susanto Zuhdi., Triana Wulandari. *Kerajaan Tradisional di ...*, (1997:98).



Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:154-155).

lebe semakin di tingkatkan. Masjid, langgar, dan surau bukan saja sebagai tempat beribadah, tetapi dimanfaatkan sebagai tempat mengaji (*Tana,o Ngaji*)⁶⁶.

Pemerintahan kesultanan Bima memiliki susunan perangkat pemerintahan yang tertulis dalam *Bo Sangaji Kai* (Catatan Kerajaan) secara terstruktur;

“Bahwa ini surat mengatakan kedudukan di balai segala kebesaran dalam tanah Bima masing-masing pada pangkat tinggi sampai pada yang rendahnya, yaitu yang pertama-tama: Sultan Bima;

<i>Tureli Nggampo (Raja Bicara)</i>	<i>Qadhi membawahi:</i>
membawahi:	
<i>Tureli Bolo</i>	<i>Bumi Nggeko</i>
<i>Tureli Donggo</i>	<i>Bumi Luma Rasana,E</i>
<i>Tureli Belo</i>	<i>Bumi Luma Bolo</i>
<i>Tureli Woha</i>	<i>Bumi Renda</i>
<i>Tureli Sakuru</i>	<i>Bumi Ngoco Mbojo</i>
<i>Tureli Parado</i>	<i>Bumi Jara Tolotui Mbojo</i>
<i>Jeneli Rasana,e</i>	<i>Bumi Jara Tolotui Bolo</i>
<i>Jeneli Sape</i>	<i>Bumi Jara Mbojo</i>
<i>Jeneli Bolo</i>	<i>Bumi Jara Bolo</i>
<i>Jeneli Woha</i>	<i>Bumi Pareka Mbojo</i>
<i>Jeneli Monta</i>	<i>Bumi Pareka Bolo</i>
<i>Jeneli Parado</i>	<i>Bumi Partiga</i>
<i>Bumi Batambani</i>	<i>Bumi Luma Kae</i>
<i>Bumi Nggampo</i>	<i>Bumi Pajuri</i>



Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:159-161).

<i>Bumi Sari Mbojo</i>	<i>Bumi Ndakatau</i>
<i>Bumi Jara Nggampo</i>	<i>Bumi Ncandi</i>
<i>Bumi Waworada</i>	<i>Bumi Ndora</i>
<i>Bumi Punti</i>	<i>Bumi Sari Ntonggu</i>
<i>Bumi Tente</i>	<i>Bumi Tonggorisa</i>
<i>Bumi Baralau</i>	<i>Bumi Roka</i>
<i>Bumi Lawi'u</i>	<i>Bumi Sari Sape</i>
<i>Bumi Sambanta</i>	<i>Bumi Jara Otuteru</i>
<i>Bumi Cenggu</i>	<i>Anangguru Pabise Mbojo</i>
<i>Bumi Nata</i>	<i>Anangguru Pabise Bolo</i>
<i>Adanya (Pembantu)</i>	<i>Anangguru Pabise Satureli⁶⁷.</i>

Jadi pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, berada di tangan sultan, pada uraian diatas pada Naskah *Bo' Sangaji Kai*. Dalam menjalankan sistem pemerintahan sehari-hari, sultan di bantu oleh Paruga Suba yang terbagi kedalam tiga Majelis, yaitu pertama, Majelis *Tureli* atau Majelis *Sara* yang beranggotakan 12 orang, terdiri dari 6 orang *tureli* dan 6 orang *jeneli*. Majelis ini lebih dikenal dengan lembaga eksekutif. Kedua, Majelis Hadat atau Majelis *Sara Tua* yang beranggotakan 12 orang, terdiri dari 12 Bumi dipimpin oleh *Bumi Luma Rasanae*. Majelis ini, dikenal dengan lembaga legislatif/yudikatif. Ketiga, Majelis Agama Islam atau Majelis Syariyyah yang dipimpin oleh *Qadhi*. Majelis Syariyyah beranggotakan 4 orang khatib yang dibantu oleh 17 orang *Lebenae*. Pada tingkat desa, dikepalai oleh *Gelarang*⁶⁸.

⁶⁷ Henri Chambert-Loir., Siti Maryam. *Bo' Sangaji Kai ...*, (2012:9-10).



Ilah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:183-86).

Sultan disebut sebagai penguasa otonom (*Zelfbesturder*) di seluruh wilayah, dan masih berhak memutuskan hukum, menurut undang-undang dengan cara adat yang masih berlaku dalam pemerintahan Bima. Dalam praktik nya, ia hanya kepala dari daerah nya sendiri. Sultan tidak diberi ruang untuk ikut terlibat dalam pemerintahan, karena kekuasaan dipegang oleh dewan kerajaan, yang memiliki kewenangan mutlak ada di tangan pejabat kolonial.

Belanda terus-menerus melakukan pengikisan atas kekuasaan terhadap pemerintahan Bima, sehingga lambat laun kekuasaan politik sultan dan pejabat tingkat hadat-syara' yang paling atas semakin melemah, dengan alasan penyederhanaan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Gelar-gelar tradisional hanya tinggal simbol-simbol saja dan mulai tidak berfungsi sesuai semestinya⁶⁹.

Pada tanggal 5 April 1942, Sultan Muh. Salahuddin merebut kekuasaan dari tangan pemerintah Hindia Belanda di Bima. Setelah kekuasaan dalam kendali penuh sultan, pada tanggal 14 Mei 1942 sultan Sumbawa dan sultan Bima merespon serta antusias terhadap kedatangan tentara Jepang, dengan cara mendengarkan pidato kolonel Saito melalui siaran radio. Sultan Sumbawa ikut membantu menangkap semua pegawai Belanda yang bertugas di daerahnya, untuk diserahkan kepada tentara Jepang. Para tawanan tersebut dibawa ke Makassar untuk dideportasi. Pada tanggal 17 Juli 1942 kolonel Saito mendarat di Bima, dengan memperlihatkan sikap simpatik kepada pemerintah kesultanan

⁶⁹ Helius Sjamsuddin. *Memori Pulau Sumbawa tentang sejarah, interaksi budaya dan sosial-politik di Pulau Sumbawa*. (Yogyakarta: Ombak, 2013),. hlm. 116-



Bima dan rakyat. Keadaan menjadi lain ketika Jepang menurunkan bendera kesultanan Bima dan menggantinya dengan bendera Hinomaru⁷⁰.

Jepang mulai memperlihatkan watak aslinya dengan menerapkan sistem pemerintahan militer pada pemerintahan kesultanan Bima. Bersikap semena-mena terhadap rakyat Bima, dengan melakukan kerja paksa dan memberikan upah yang tidak sesuai. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya rasa ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Jepang. Infrastruktur di hancurkan. Nama-nama sekolah diganti dengan bahasa Jepang⁷¹. Kebutuhan pokok masyarakat, diambil secara paksa untuk memenuhi bahan pangan untuk perang.

Rupanya Jepang tidak bertahan lama, karena kekuatan dalam Perang Dunia II semakin lemah. Pada tahun 1945, kedudukan Jepang di Indonesia semakin sulit, tentara sekutu berhasil memukul mundur tentara Jepang. Khususnya di kesultanan Bima, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Hal itu menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan, walaupun masih mendapatkan rintangan dari beberapa tentara Jepang yang masih tersisa. Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945⁷². Di beberapa daerah, informasi terkait berita kemerdekaan Indonesia khususnya Bima baru terdengar pada tanggal 2

⁷⁰ Bagus Wirawan. *Pusaran Revolusi Indonesia di Sunda Kecil 1945-1950*. (Udayana University Press: Bali, 2012), hlm. 47. Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:306).

⁷¹ Abdullah Tajib. *Sejarah Bima Dana ...*, (1995:323).



Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:174-177).

September 1945. Pada tanggal 31 Oktober 1945 diadakan upacara kenaikan bendera sang merah putih di depan istana Bima.

Tiga Minggu setelah pengibaran bendera merah putih, Sultan Muh. Salahuddin mengeluarkan maklumat pada tanggal 22 November 1945, berbunyi sebagai berikut:

“Kami Sultan Kesultanan Bima menyatakan dengan sepenuhnya: (1) berdiri di belakang pemerintah RI dan sebagai daerah negara RI; (2) kekuasaan-kekuasaan yang sampai ini tidak di tangan kami maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami; (3) pemerintahan Kesultanan Bima bersifat langsung dengan pusat negara RI; (4) kami memerintahkan dan percaya kepada sekalian penduduk dalam seluruh kesultanan Bima sesuai dengan sabda kami yang menyatakan di atas”. Maklumat ini merupakan pula pernyataan yang tidak mengakui lagi pemerintahan Jepang yang kala itu masih memperlihatkan kekuasaannya di Bima⁷³.

Pada tanggal 29 November 1945, Jepang mengambil alih kekuasaan secara sepihak. Sehingga membangkitkan kegelisahan pada pemuda Bima dalam gerakan API (Angkatan Pemuda Indonesia) untuk melakukan serangan pertama, yang dilancarkan di markas tentara Jepang di Nggembe pada tanggal 25 Desember 1945. Kemudian berikutnya, penyerangan terjadi di tangsi Jepang yang berada di daerah Sape, pada tanggal 29 Desember 1945. Sasaran gerakan selanjutnya, adalah tangsi Jepang di Raba pada 1 Januari 1946 yang diikuti dengan pemberontakan-pemberontakan di Tente, Lunibo, Rabangodu, Lawata dan Pelabuhan Bima. Pemberontakan dapat digagalkan dan Jepang merampas kembali senjata dari para pemuda. Pemimpin API yaitu M. Tayib Abdullah



s Wirawan. *Pusaran Revolusi Indonesia ...*, (2012:104).

dan Ishak Abdullah di tangkap⁷⁴. Demikian seluruh perlawanan rakyat dapat dilumpuhkan dan memudahkan jalan bagi pendaratan NICA di daerah Bima.

Pada tanggal 2 Januari 1946, sultan mengeluarkan surat pernyataan untuk menolak kedatangan NICA. NICA datang untuk berusaha memecah-belah persatuan. Setuasi keamanan politik semakin rawan dan melemah, dimanfaatkan oleh Gubernur Jenderal DR. H. J. Van Mook untuk membujuk penguasa-penguasa di daerah, untuk memisahkan diri dari NKRI. konferensi-konferensi tersebut berhasil mendirikan negara boneka. Disisi lain politik *divide et impera* ikut mempengaruhi keamanan dan politik di kesultanan Bima⁷⁵.

Pada tanggal 16 Juli 1946, H.J. van Mook mengundang pemerintah daerah di luar Jawa terutama, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan dan sebagian Sumatera untuk menghadiri Konferensi Malino. Dalam Konferensi Malino H.J. van Mook berusaha agar daerah-daerah swapraja dan daerah di luar Jawa melepaskan diri dari NKRI. Dalam konferensi tersebut sultan Bima ikut serta dalam pertemuan. Setelah itu dibuat lagi pertemuan pada tanggal 7 Desember 1946, pertemuan bertujuan untuk membicarakan terkait kelanjutan dalam Konferensi Malino untuk pengambilan keputusan. Pertemuan tersebut dikenal dengan Konferensi Denpasar (Bali). Pada konferensi Denpasar, H.J. van Mook berhasil dengan rencananya, untuk memecahkan persatuan daerah-daerah Nusa

⁷⁴ Lalu Wacana (et.al.). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984., hlm 120-122.



Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:191-199).

Tenggara, Bali, Sulawesi, dan Maluku. Terbentuklah Negara Indonesia Timur (NIT) dengan mengangkat Tjokordo Gede Raka Sukawati sebagai Presiden⁷⁶.

Sejak pembentukan NIT, tampak adanya pandangan aliran politik yang berbeda. Berharap bahwasanya penting untuk pembangunan Indonesia, dalam ketatanegaraan federal atau serikat. Menyimpulkan sesuatu dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, H.J. van Mook melakukan konferensi-konferensi di tingkat pusat. Pada tanggal 11-15 November 1946, diadakan Konferensi Linggarjati. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahril sedangkan Belanda oleh Prof. Schemerhon. Perundingan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memutuskan hubungan pemerintah pusat dengan daerah dengan beberapa pertimbangan. Berdasarkan keputusan dalam konferensi, Belanda hanya mengakui secara de facto, wilayah republik Indonesia hanya Jawa, Madura dan Sumatera⁷⁷.

Akibat dari Konferensi Linggarjati, timbul reaksi pro dan kontra di kalangan rakyat Indonesia. Belanda melakukan perlawanan, lewat Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Perperangan dan pertempuran antara TNI dan tentara NICA mulai surut. Resolusi dewan keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 meminta agar perselisihan antara Indonesia dengan Belanda diselesaikan secara damai melalui meja perundingan, dan pihak Belanda menerima penawaran tersebut. Pada tanggal 14 April 1949 di Jakarta, dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan tersebut dikenal dengan *Roem-Royen*.

⁷⁶ Hilir Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:200).

s Wirawan. *Pusaran Revolusi Indonesia ...*, (2012:198-99).



Hasil keputusan *Roem-Royen* keluar. Sultan Muh. Salahuddin langsung mengadakan pertemuan dengan sultan Dompu dan sultan Sumbawa untuk membahas sikap politiknya. Pertemuan berlangsung di Dompu pada tanggal 11 April 1950, hal tersebut berhasil memutuskan satu pernyataan untuk bergabung dengan Republik Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pernyataan sultan Muh. Salahuddin tetap sama dengan bunyi maklumat yang disampaikan nya pada tanggal 22 November 1945⁷⁸.



Ismail. *Peran Kesultanan Bima ...*, (2004:201-207).